

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Desa

2.1.1. Definisi Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2), pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, membina, dan meningkatkan perekonomian desa sehingga dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Dalam sektor ekonomi, kepala desa memiliki kewajiban dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengelola keuangan serta aset desa. Desa sebagai suatu bagian dari pemerintahan, tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya (Septiawan, 2018).

Menurut Danuta (2017), kualitas laporan keuangan desa juga menjadi indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa, terutama oleh Kementerian Desa secara umum. Pengukuran kualitas pengelolaan dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan pendapat yang diberikan oleh BPK atas hasil audit yang telah dilakukan.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan Desa

2.2.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan, laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari transaksi dan status keuangan yang dilaksanakan oleh sebuah entitas saat periode pelaporan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah, mengevaluasi kondisi ekonomi, menilai efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula, laporan tentang pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk akuntabilitas kinerja yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setiap laporan keuangan desa harus memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Informasi yang disajikan harus mengikuti standar laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan desa harus bisa dipertanggungjawabkan serta diakses oleh seluruh masyarakat desa. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan desa tidak boleh dilakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

2.2.2. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat empat karakteristik kualitatif yang menjadi ukuran normatif untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diharapkan. Keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah:

1. Relevan

Untuk dianggap relevan, sebuah laporan keuangan harus mengandung informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, dan melakukan koreksi atau perbaikan terhadap hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan harus mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Laporan keuangan berisi informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi sejauh mana ekspektasi mereka terpenuhi di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*)

Dalam laporan keuangan, informasi yang relevan dapat membantu pengguna untuk membuat prediksi tentang masa depan berdasarkan kinerja masa lalu dan peristiwa terkini.

- c. Tepat waktu (*timeliness*)

Ketepatan waktu saat menyajikan informasi dalam laporan keuangan sangat penting agar informasi tersebut efektif dan bermanfaat guna pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dan mencakup semua informasi akuntansi yang relevan dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi keuangan suatu entitas secara akurat dan transparan.

2. Andal

Laporan akuntansi tahunan harus mengandung informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta mencerminkan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Hal ini sangat penting agar para pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi keuangan suatu entitas secara akurat dan dapat memutuskan tindakan bisnis yang tepat. Jika informasi dalam laporan keuangan tidak akurat atau disajikan dengan cara yang menyesatkan, maka penggunaannya dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah dan merugikan informasi keuangan. Oleh karena itu, informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Dalam laporan keuangan informasi yang disajikan harus dapat menggambarkan transaksi dan peristiwa akuntansi dengan jujur dan

wajar. Artinya, informasi tersebut harus menggambarkan realitas yang sebenarnya secara objektif dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan seharusnya dapat diuji untuk memastikan kebenarannya. Hasil dari pengujian harus menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

c. Netralitas

Informasi dalam laporan keuangan seharusnya diarahkan pada kebutuhan umum, bukan hanya pada kebutuhan pihak tertentu atau kelompok kepentingan tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan dari entitas pelaporan lainnya secara umum. Hal ini karena perbandingan tersebut bisa membantu pengguna untuk memahami tren dan perubahan dalam keuangan entitas pelaporan serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang memungkinkan perbandingan antara periode atau antar

entitas pelaporan yang serupa sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna dan menggunakan istilah dan format yang sesuai dengan tingkat pemahaman para pengguna. Hal ini sangat penting karena laporan keuangan dapat diakses oleh berbagai pengguna yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan aspek kejelasan, keakuratan, dan kemudahan pemahaman agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengguna.

Berdasarkan dari keempat indikator yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan mengadopsi kuesioner yang telah disesuaikan dari penelitian Atikah (2019).

2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.3.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

“kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.”

Kompetensi adalah faktor krusial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menunjukkan kinerja optimalnya dan juga menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Berdasarkan Mangkunegara (2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat pribadi yang berpengaruh pada kinerja seseorang. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia dapat dianggap sebagai faktor pendukung kualitas laporan keuangan desa. Apabila perangkat desa memiliki kompetensi yang rendah, mereka tidak akan dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang baik. Oleh karena itu, laporan keuangan desa dapat dinilai kurang baik atau buruk.

2.3.2. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011, indikator kompetensi sumber daya manusia meliputi:

1. Pengetahuan

Informasi tentang kewajiban yang harus dipenuhi adalah hal yang penting untuk dipahami oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau sumber informasi lainnya dapat membantu seseorang untuk memahami kewajiban tersebut dengan lebih baik. Selain itu, karyawan yang memiliki keterampilan yang memadai dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

2. Keterampilan

Kompetensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Dengan memiliki kompetensi yang memadai, seseorang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kompetensi dapat mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik kepribadian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

3. Sikap

Respon terhadap tugas yang diberikan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pegawai yang memiliki sikap yang mendukung keberhasilan organisasi, seperti sikap bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya, mampu memberikan dampak positif pada kinerja dan produktivitas organisasi. Dalam situasi apa pun, pegawai yang bertanggung jawab akan berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin dan menghasilkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan indikator kompetensi sumber daya manusia diatas, penelitian ini akan mengadopsi kuesioner yang telah disesuaikan dari penelitian Atikah (2019).

2.4. Transparansi

2.4.1. Definisi Transparansi

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah saat membentuk kebijakan fiskal daerah agar diketahui dan diawasi oleh DPRD serta masyarakat. Menurut Amalia (2017), transparansi dalam setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dapat menciptakan keadilan dan mendorong pengungkapan kondisi yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan setiap pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan organisasi dapat mengukur dan mengantisipasi berbagai hal yang terkait dengan organisasi tersebut. Dengan demikian, transparansi memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam suatu organisasi. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi, dimana informasi yang terkait dengan kepentingan publik dapat diperoleh oleh siapa saja yang membutuhkannya secara langsung. Dengan demikian, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses pada informasi penting yang berkaitan dengan organisasi atau pemerintahan, sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan yang diambil. Hal ini memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Transparansi laporan keuangan pemerintah desa adalah prinsip yang menjamin ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh setiap orang mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat

dan pihak terkait dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai laporan keuangan pemerintah desa, sehingga dapat memantau pengelolaan keuangan desa secara lebih baik dan memberikan masukan serta saran yang konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, jika transparansi rendah, maka akan sulit bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan memantau pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

2.4.2. Manfaat Transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang memiliki kepentingan, termasuk peraturan, kebijakan pemerintah, dan informasi lainnya yang tersedia untuk umum. Ini berarti bahwa tujuan dari transparansi adalah untuk menyediakan akses bebas yang cukup terhadap informasi agar dapat dipahami dan diawasi. Manfaat transparansi menurut Andrianto (2007), terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas

Dengan transparansi, pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban.

2. Meningkatkan partisipasi publik

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai hal, seperti pilihan politik, penilaian kinerja pemerintah, dan lainnya.

3. Meningkatkan kredibilitas

Dengan memberikan akses informasi yang terbuka, transparansi membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas terhadap pihak yang terkait, seperti pemerintah atau organisasi.

4. Mencegah korupsi

Dengan transparansi, pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang cukup untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kebijakan dilakukan dengan transparan dan tidak ada praktik korupsi.

5. Meningkatkan efisiensi

Dengan adanya transparansi, pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengidentifikasi kelemahan dan masalah dalam sistem yang ada, sehingga memudahkan upaya perbaikan dan peningkatan efisiensi.

2.4.3. Indikator Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Indikator transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu

Agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk mencegah tertundanya pengambilan keputusan tersebut, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu.

2. Memadai

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia melibatkan pengungkapan yang memadai atas hal-hal material yang informatif.

3. Jelas

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, informasi harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

4. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

5. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan seharusnya dapat dibandingkan dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya dan dapat dibandingkan dengan institusi sejenis. Oleh karena itu, daya banding yang dimaksudkan adalah bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi sejenis lainnya.

6. Mudah diakses

Semua pihak harus dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

7. Kondisi Keuangan

Sebuah gambaran lengkap atau status keuangan suatu organisasi selama periode atau durasi tertentu.

8. Susunan pengurus

Unit-unit kerja yang terdiri dari organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas dan koordinasi dari berbagai fungsi atau aktivitas yang berbeda.

9. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Sebuah rangkaian langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini akan menggunakan indikator tersebut sebagai alat untuk mengukur variabel transparansi yang akan dimodifikasi dari penelitian Riyanti (2017).

2.5. Sistem Pengendalian Internal

2.5.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal termasuk dalam faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Winarno (2006), sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”

Sedangkan menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway* (COSO) dalam Boynton, dkk. (2002) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan,

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi akan mencapai efektivitas dan efisiensi yang optimal ketika pengendalian internal dijalankan dengan baik. Hal ini juga memastikan kebenaran penyajian informasi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.5.2. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Lima komponen sistem pengendalian internal yang saling berhubungan diidentifikasi oleh COSO dalam Boynton, dkk. (2002) untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal suatu entitas. Kelima komponen tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian memengaruhi kesadaran orang-orang dalam organisasi terhadap pengendalian dan menentukan suasana di dalamnya. Lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua elemen pengendalian internal yang lain.

2. Penilaian risiko

Pengendalian internal harus melakukan evaluasi terhadap risiko yang dihadapi oleh unit organisasi baik dari dalam maupun luar organisasi. Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan risiko tersebut harus dinilai relatif terhadap toleransi risiko yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, penilaian risiko menjadi dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu menjamin bahwa instruksi dari pimpinan instansi pemerintah dijalankan. Kegiatan pengendalian harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi, dan dilaksanakan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap entitas dalam menjalankan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan, berkualitas baik, berasal dari sumber internal maupun eksternal, serta disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu dan tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Kegiatan pemantauan melibatkan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Lima komponen di atas akan digunakan menjadi indikator dalam mengukur sistem pengendalian internal menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Atikah (2019).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. *Stewardship Theory*

Stewardship theory adalah suatu keadaan dimana manajemen tidak dimotivasi oleh keinginan pribadi tetapi dipusatkan pada kepentingan organisasi sebagai tujuan utama (Donaldson & Davis, 1991). Seiring dengan meningkatnya persyaratan akuntabilitas organisasi sektor publik, semakin sulit bagi otoritas untuk memenuhi fungsi manajemen keuangan mereka sendiri, sehingga peran akuntansi dalam memisahkan fungsi-fungsi kepemilikan dan fungsi manajemen diperlukan untuk memikul tanggung jawab sosial serta tanggung jawab atas pengelolaan milik negara.

Stewardship theory menegaskan bahwa kepentingan masyarakat bisa dioptimalkan dengan membagi hak, tanggung jawab, dan wewenang antara pengawas dan manajemen, sehingga *stewardship theory* menyatakan para eksekutif lebih semakin memiliki motivasi untuk bertindak dalam kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi (Hunger & Wheelen, 2004). Teori ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara kepuasan dan kesuksesan sebuah organisasi. Kesuksesan dapat tercapai dengan mengoptimalkan utilitas prinsipal dan manajemen.

Teori ini menggambarkan hubungan antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Pada awalnya, akuntansi hanya memfokuskan pada pencatatan, pengamanan aset, dan pelaporan keuangan. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, disiplin akuntansi mengalami perluasan dan menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu lain seperti psikologi dan sosiologi. *Stewardship theory* kemudian muncul sebagai hasil dari pengembangan teori ini.

Melalui *stewardship theory* penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana dalam mewujudkan laporan keuangan yang memiliki kualitas di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa berperan sebagai *steward*, yang bertugas memberikan informasi yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat atau pemerintah terhadap pengelolaan anggaran negara agar dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk menjadi lembaga yang handal, pemerintahan desa diharuskan untuk memenuhi aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dipercayakan kepadanya dengan harapan tujuan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat tercapai secara optimal.

2.6.2. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Kompetensi sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah:

“kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.”

Menurut Mangkunegara (2012), kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang berkaitan dengan wawasan, kemampuan, kecakapan, dan karakteristik kepribadian yang memberi dampak langsung terhadap kualitas pekerjaan.

Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengalaman yang memadai menjadi andal dan berperan sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas. Organisasi wajib selalu berusaha untuk menaikkan nilai dari sumber daya manusia. Misalnya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang memungkinkan tindakan efektif sumber daya manusia untuk melakukan tugas saat ini dan mempersiapkan tugas di masa depan. Peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

2.6.3. Hubungan Transparansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Transparansi kebijakan dan keputusan organisasi manapun dapat menciptakan keadilan dan mendorong pengungkapan yang benar, memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk mengukur dan memprediksi segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi (Amalia, 2017). Transparansi didasarkan pada akses informasi yang bebas, informasi yang

berkaitan dengan kepentingan umum diterima langsung oleh mereka yang membutuhkannya (Mardiasmo, 2009). Dengan transparansi laporan keuangan setiap desa, keadilan tercapai, dan pengungkapan keadaan yang sebenarnya dimajukan sehingga kualitas keuangan desa baik dan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.

2.6.4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Winarno (2006) adalah sebagai berikut:

“rencana sebuah organisasi dan seluruh tindakan serta teknik terkoordinasi yang telah diterapkan di sebuah perusahaan untuk melindungi aset, menjaga keakuratan dan keandalan informasi akuntansi, menaikkan efisiensi dan menaikkan pelaksanaan kebijakan manajemen.”

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway* (COSO) dalam Boynton, dkk. (2002) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan dewan direksi, manajemen, dan karyawan lain suatu perusahaan, yang tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan keefektifannya. dan efisiensi untuk memastikan efisiensi operasional.”

Dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik, maka diperlukan lima komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan (COSO dalam Boynton, dkk., 2002). Penyajian informasi dalam laporan keuangan desa dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas apabila entitas dapat menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Rifandi (2019) dengan judul Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Erawati dan Hamanay (2022) yang berjudul Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). Hasil dari penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah desa sedangkan variabel independen penelitian ini adalah implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan transparansi berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ferdian (2021) mengangkat judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Dusun di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan, aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rofikoh & Ayem (2020) mengenai Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen). Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi akuntansi, pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian kelima dilakukan oleh Kusumadewi (2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi pada Perangkat Desa se Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka). Penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Selanjutnya penelitian keenam yang dilakukan oleh Atikah (2019) dengan judul Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan

Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Situbondo). Menyatakan bahwa sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Lisda, dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat). Hasil penelitian ini adalah implementasi SIMDA desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Zuhroh (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Penelitian ini memberikan hasil kompetensi bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Hasliani & Yusuf (2021) yang berjudul Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Penelitian terdahulu terakhir dilakukan oleh Riyanti (2017) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,

dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). Penelitian ini memberikan hasil akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan transparansi dan penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Rifandi (2019)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Daerah X_2: Kompetensi Sumber Daya Manusia X_3: Transparansi</p>	Pemerintah Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi aplikasi sistem keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2.	Erawati & Hamanay (2022)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa X_2: Kompetensi Sumber Daya Manusia X_3: Sistem Pengendalian Internal</p>	Pemerintah Desa se Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

		X_4 : Transparansi		4. Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
3.	Ferdian (2021)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Pemanfaatan Teknologi Informasi X_2: Aplikasi Sistem Keuangan Desa X_3: Kompetensi Sumber Daya Manusia X_4: Sistem Pengendalian Internal</p>	Pemerintah Dusun dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Aplikasi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 4. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.
4.	Ayem & Rofikoh (2020)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Kompetensi Akuntansi X_2: Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 X_3: Sistem Informasi X_4: Pengendalian Internal</p>	Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 4. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
5.	Kusumadewi (2020)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa</p>	Pemerintah Desa se Kecamatan Banjarnegara Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

		<p>Variabel Independen (X): X_1: Kompetensi Sumber Daya Manusia X_2: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa X_3: Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	Majalengka	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
6.	Atikah (2019)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Sistem Keuangan Desa X_2: Kompetensi Sumber Daya Manusia X_3: Sistem Pengendalian Internal</p>	Perangkat desa di wilayah Kabupaten Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
7.	Lisda, dkk (2018)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Implementasi SIMDA Desa X_2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X_3: Kompetensi Sumber Daya Manusia</p>	Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SIMDA desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. 3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
8.	Zuhroh (2021)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Kompetensi Bidang Akuntansi</p>	Pemerintah desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

		X_2 : Sistem Pengendalian Intern		
9.	Hasliani & Yusuf (2021)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa X_2: Transparansi</p>	Perangkat desa di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
10.	Riyanti (2017)	<p>Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Independen (X): X_1: Akuntabilitas X_2: Transparansi X_3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah X_4: Penerapan Sistem Pengendalian Internal</p>	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Menurut Mangkunegara (2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap

kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013, kompetensi sumber daya manusia adalah:

“kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.”

Untuk menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam pembuatannya.

Hasil penelitian dari Rifandi (2019) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia pernah dilakukan oleh (Hamanay & Erawati, 2022) dan menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian hasil penelitian dari Ferdian (2021) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian lain dari (Atikah, 2019) menyatakan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lisda, dkk (2018) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi (2020), yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1} = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

2.9.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi maka keadilan dapat ditimbulkan serta akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi (Amalia, 2017). Penyajian laporan keuangan yang transparan dan terbuka mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi transparansi maka kualitas laporan keuangan desa akan semakin meningkat.

Hubungan antara transparansi dan kualitas laporan keuangan telah diteliti oleh Rifandi (2019) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Hamanay & Erawati (2022) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasliani & Yusuf (2021) yang menunjukkan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Riyanti (2017) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A2} = Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.9.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Winarno (2006) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway* (COSO) dalam Boynton, dkk. (2002) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.”

Penyajian informasi dalam laporan keuangan desa dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila entitas dapat menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik.

Keterkaitan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan desa telah dibuktikan dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hamanay & Erawati (2022) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Rofikoh

(2020) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2019) yang menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian lain dilakukan oleh Lisda, dkk (2018) dengan hasil sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2021) memberikan hasil yang berbeda, yaitu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A3} = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.